

J-MAKSI JURNAL MAGISTER AKUNTANSI

ISSN : 2684-9380

Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2019

Faktor-Faktor Kualitas Audit Pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Dailibas & Asep Effendi R

Determinasi Opini Audit Going Concern
Endang Susilawati, Fitriana, Harry Suharman

**Good Corporate Governance Untuk Upaya Mewujudkan Kinerja Manajerial
di Lingkungan Perguruan Tinggi
(Survei Pada Politeknik Pos Indonesia)**
Irma Rachmawati, Harry Suharman, Farida Yuliaty

**Kompetensi, Profesionalisme, Orientasi Etika dan Kualitas Hasil Audit
Internal
(Studi Kasus di PT. Unilon Textile Industries)**
Lesa Andrianti, Fitriana, Demsi Minar

**Faktor-Faktor Dalam Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Se-Kota Bandung)**
Linda Mauliani Purnamasari, Harry Suharman, Didin Saepudin

**Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Indonesia Tahun
2011-2015**
Roro Endah Kumalasari, Fitriana, Farida Yuliaty

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI JURNAL MAKSI
MAGISTER AKUNTASI
UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP**

VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI-JUNI 2019

Penasehat : Rektor USB YPKP
Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., CFA, CRBC
Ketua LPPM USB YPKP
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si., CFA

Penanggung Jawab : Dr. H. Vip Paramarta, Drs., MM., CFA
Ketua Redaksi : Dr. Fitriana, SE., M.Si., CA., Ak.
Dewan Pengarah : Dr. H. Ricky Agusiady, SE., MM., Ak., CFA
Dr. Farida Yuliaty, SE., SH., MM
Tevy Leviany, SE., M.Si., CA., AK

Dewan Editor
Ketua : Prof. Dr. Amilia
Dr. Tettet Fitrianti, SE., M.Si., Akt., CA
Dr. H. Harry Suharman, SE., MA., CSRS., CA., Ak

Artistik/Publikasi/
Sirkulasi : Fredy, SE
Mira MAesaroh
Gamal Husyaini

ISSN : 2684-9380
Alamat Redaksi : Jl. Surapati Np 189 40123, Cikutra, Cibeuying Kidul Kota Bandung
Tlp. (022) 21000307 Fax. (022) 7201756
Usbypkp.pasca@gmail.com

DAFTAR ISI

Faktor-Faktor Kualitas Audit Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dailibas & Asep Effendi R – 1

Determinasi Opini Audit *Going Concern*

Endang Susilawati, Fitriana, Harry Suharman – 10

***Good-Corporate Governance* Untuk Upaya Mewujudkan Kinerja Manajerial Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Survei Pada Politeknik Pos Indonesia)**

Irma Rachmawati, Harry Suharman, Farida Yuliaty – 18

Kompetensi, Profesionalisme, Orientasi Etika dan Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Kasus di PT. Unilon Textile Industries)

Lesa Andrianti, Fitriana, Demsi Minar – 27

Faktor-Faktor Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Se-Kota Bandung)

Linda Mauliani Purnamasari, Harry Suharman, Didin Saepudin – 35

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Indonesia Tahun 2011-2015

Roro Endah Kumalasari, Fitriana, Farida Yuliaty – 44

AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2011-2015

Roro Endah Kumalasari, Fitriana, Farida Yuliaty
roroendahk@ymail.com

ABSTRACK

This research aims to examine the effect of accountability of local government financial statements (audit opinion, the number of SPI weaknesses and the number of non-compliance with legislation), local government financial performance (growth ratio, capital expenditure activity ratio, operating expense ratio, and self-reliance ratio) size of local government (total assets) to the level of corruption of local governments in the province of Indonesia in 2011-2015. This research shows that accountability of local government financial report and size of local government have significant effect to corruption level, while local government financial performance has no significant effect on corruption level.

Keyword : *accountability, opinion, SPI, legislation, financial performance, growth ratio, capital expenditure activity ratio, operating expense ratio, and self-reliance ratio, asset, corruption*

Pendahuluan

Perkembangan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi keuangan daerah.

Indonesia menghadapi masalah yang serius dalam korupsi. Kasus korupsi juga menjerat pejabat di pemerintah pusat seperti menteri dan anggota DPR.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, salah satunya membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken, 2007).

Upaya pemberantasan korupsi tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Institusi pemeriksa yang dibuat oleh pemerintah antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jendral masing – masing instansi pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses audit internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Adanya kenaikan persentase opini WTP dan WDP serta penurunan presentase opini TW dan TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyampaikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

Permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat / pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta lalai/sengaja membuat pertanggungjawaban belanja dengan benar. instansi pemerintah juga dituntut agar mempunyai kinerja keuangan yang baik dengan tujuan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Semakin baik kinerja keuangan suatu instansi maka masyarakat luas beranggapan bahwa semakin kecil pula tingkat korupsi yang terjadi di instansi tersebut. Hal ini juga berlaku di tingkat pemerintah daerah, dimana masyarakat beranggapan bahwa dengan semakin baiknya kinerja keuangan suatu pemerintah, maka tingkat korupsi di pemerintah itu semakin kecil.

Penilaian kinerja suatu pemerintah daerah tidak hanya bisa dilihat dari hasil audit BPK, namun bisa juga dinilai dari kinerja keuangannya berdasarkan rasio keuangan pada APBD. Dengan menggunakan rasio keuangan APBD dapat terlihat tingkat kemandirian, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode (Rika 2016).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Penerapan asas keterbukaan (transparan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.

Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah. Semakin baik terciptanya transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat mengurangi praktek korupsi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas keuangan pemerintah, maka korupsi yang terjadi di daerah harapannya semakin berkurang.

Hubungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk menciptakan transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2009). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Halim (2010 : 93) menunjukkan kinerja pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, semakin tinggi alokasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti belanja investasi/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Sehingga semakin tinggi rasio kinerja pemerintah semakin bagus kinerja pemerintah daerah, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat korupsi, atau rasio kinerja pemerintah berhubungan positif dengan Indeks Persepsi Korupsi. Kinerja

Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu

pemerintah daerah menandakan semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka peluang untuk terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin besar seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum di pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015 yang dipublikasikan di website pemerintah daerah.

Sementara untuk Sampel penelitian berjumlah 135 LKDP

Pembahasan

Pertama, Hasil Analisis Deskriptif Opini Audit

Dari hasil analisis diketahui bahwa opini yang didapat dari LKPD yang diperiksa rata – rata mendapatkan opini WTP. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Meskipun sistem pengelolaan dan tanggung jawab daerah menunjukkan perbaikan, tetapi masih ada 10 LKPD yang diberikan opini-TMP oleh BPK. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal.

Kedua, Hasil Analisis Deskriptif Jumlah Temuan Kelemahan SPI

Dari hasil analisis deskriptif didapat menunjukkan rata – rata jumlah temuan kelemahan SPI untuk masing–masing pemerintah daerah sebesar 30 temuan.

Ketiga, Hasil Analisis Deskriptif Jumlah Temuan Ketidapatuhan terhadap Perundang – Undangan

Dari hasil analisis deskriptif didapat bahwa jumlah temuan ketidapatuhan terhadap perundang–undangan didapat 20 sampai 30 jumlah temuan kelemahan SPI yang didapat.

Keempat, Hasil Analisis Deskriptif Rasio Pertumbuhan

Dari hasil analisis deskriptif rata – rata rasio pertumbuhan pemerintah daerah sebesar 15,13% atau kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan setiap tahunnya masih rendah. kinerja pertumbuhannya menurun dengan meningkatnya belanja operasi pada tahun tersebut.

Kelima, Hasil Analisis Deskriptif Rasio Aktivitas Belanja Operasi

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa tingginya presentasi untuk pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana belanja operasi sebesar 71,18%, untuk belanja operasi yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran

Keenam, Hasil Analisis Deskriptif Rasio Aktivitas Belanja Modal

Dari hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana belanja modal untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

Ketujuh, Hasil Analisis Deskriptif Rasio Kemandirian

Dari hasil analisis deskriptif diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat baik. Dalam rentang 44% pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat Konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, yang artinya pemerintah daerah sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerahnya.

Kedelapan, Hasil Analisis Deskriptif Asset

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa setiap tahunnya provinsi mengalami peningkatan dalam total asset sebesar Rp 2triliun/tahun sampai dengan Rp 3triliun/tahun.

Kesembilan, Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Korupsi

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa setiap tahunnya rata – rata tingkat korupsi meningkat 20,16% atau sebesar 10 kasus korupsi/tahun.

Uji Model Estimasi

Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect

Pertama : Opini Audit (opini) berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, dan memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi.

Kedua: Jumlah temuan kelemahan SPI (spi) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, maka dapat dikatakan bahwa jumlah temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi, dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat korupsi.

Ketiga : Jumlah temuan ketidapatuhan terhadap perundang – undangan (uu) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi, jumlah temuan ketidapatuhan terhadap perundang –

undangan lebih besar dari tingkat signifikan, maka jumlah temuan ketidakpatuhan perundang – undangan terhadap tingkat korupsi tidak berpengaruh signifikan, tetapi memiliki hubungan yang positif.

Rasio Kemandirian (kemandirian) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, tetapi memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi.

Rasio Aktivitas Belanja Operasi (akvboper) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat korupsi.

Rasio Aktivitas Belanja Modal (akvbmod) berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi dan memiliki hubungan yang positif.

Rasio Pertumbuhan (pertumbuhan) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi dan memiliki hubungan yang negatif.

Total Asset (asset) berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi dan memiliki hubungan yang positif.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah secara bersama – sama sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini berarti hanya 17,3% tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh akuntabilitas LKPD, kinerja keuangan pemda, dan ukuran pemda. Dengan demikian, sisanya 82,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Hasil F statistic model Random Effect sama dengan hasil dari Common Effect.

Metode Pemilihan Model

Uji Chow

Dari hasil di atas, maka dapat diketahui bahwa model Fixed Effect yang terpilih, karena nilai F Hitung lebih besar dari F

Kritis, yaitu $F \text{ Hitung } 0.05 > F \text{ Kritis Prob } 0.000$.

Uji Hausman

Hasil di atas menunjukkan bahwa $\beta_1 > 0,05$, maka model yang terpilih adalah Random Effect. Kesimpulan dari kedua uji pemilihan model tersebut adalah model Random Effect tanpa harus dilakukan uji selanjutnya yaitu LM Test. LM Test merupakan test yang dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara Common Effect dan Random Effect (Greene, 2002).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas : Dari hasil di atas, diketahui bahwa nilai Probability $> 0,05$ maka data yang terdapat pada penelitian ini memiliki distribusi normal

Uji Multikoloniaritas : Pada hasil uji multikoloniaritas nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka pada data penelitian ini tidak terjadi korelasi.

Uji Autokorelasi : Karena nilai DW (2.103717) terletak diantara batas atas atau upper bound (du, 1.8457) dan (4-du, 2.1543) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti data dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas : Dari hasil di atas, terlihat bahwa nilai Prob.F > 0.05 yaitu 0.9734 maka data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas.

Koefisien Determinasi

Bahwa adjusted R-Squared 0.173033 atau sebesar 17,3% dengan klasifikasi sangat rendah. Hal ini berarti hanya 17,3% tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh akuntabilitas

LKPD, kinerja keuangan pemda, dan ukuran pemda. Dengan demikian, sisanya 82,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat korupsi antara lain: transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah dan Politik Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nurhasanah (2016), Khairudin (2016) dan Pratama (2016). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rika (2016) dan Setiawan (2012).

Pengaruh Jumlah Temuan Kelemahan SPI terhadap Tingkat Korupsi

Jumlah temuan kelemahan SPI berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi

Pengaruh Jumlah Temuan Ketidapatuhan terhadap Perundang – Undangan terhadap Tingkat Korupsi

Jumlah temuan ketidapatuhan terhadap perundang – undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Korupsi

Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi

Pengaruh Rasio Aktivitas Belanja Operasi terhadap Tingkat Korupsi :

Rasio aktivitas belanja operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi

Pengaruh Rasio Aktivitas Belanja Modal terhadap Tingkat Korupsi

Rasio aktivitas belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Tingkat Korupsi

Rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi

Variable total asset berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Secara bersama – sama akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah -- serentak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah maka, dapat mengurangi tingkat korupsi di

pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka tingkat korupsi akan semakin banyak dengan mudahnya oknum yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan dana APBD pemerintah daerah.

Simpulan

Hasil penelitian secara parsial

Pertama, Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dapat dijadikan tolok ukur dalam pemberian opini audit going concern dari auditor.

Kedua, Pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi pemberian opini audit going concern, perusahaan yang mengalami penurunan penjualan belum tentu menerima opini audit going concern hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor tidak mempertimbangkan pertumbuhan penjualan perusahaan dalam memberikan opini audit going concern, karena peningkatan penjualan tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan laba.

Ketiga, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, menunjukkan bahwa besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi opini going concern yang diterima

Keempat, oleh perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar tidak menjamin mampu menyelesaikan masalah going concern yang dihadapinya.

Kelima, Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi pemberian opini audit going concern, hal ini menunjukkan KAP big four maupun non big four akan tetap memberikan opini audit going concern kepada perusahaan yang terganggu

masalah kelangsungan usahanya dengan tetap berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Hasil penelitian secara simultan

Hasil penelitian dengan omnibus test menunjukkan bahwa kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern, hal ini membuktikan bahwa secara bersama-sama menjadi pertimbangan auditor dalam pemberian opini going concern.

Daftar Pustaka

- Ardiyos, Kamus Besar Akuntansi, Citra Harta Prima, Jakarta, 2010
- Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Agus, Riyanto. (2011). Buku Ajar Metodologi Penelitian. Jakarta: EGC
- Arens, Alvin A dan James L. Loebbecke (Herman Wibowo, Penerjemah). 2015. Auditing Pendekatan Terpadu. Buku Dua Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, 2006, Auditing and Assurance Service, USA : Pearson Education International
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Bugis, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

- Bambang Riyanto. 2011, Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : YBPFE UGM.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. Teori Akuntansi . Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. buku edisi Indonesia Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Darmadi, 2011
- Fahmi, Irham. 2014. Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan soal tanya jawab. cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Imam Ghozali 2013. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, 2010, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Jogiyanto Hartono, 2013. “Teori Portofolio dan Analisis Investasi”, BPFE Yogyakarta, Edisi Kedelapan, Yogyakarta.
- Machfoedz, Mas’ud. 1996. Akuntansi Manajemen, Perencanaan dan Pembuatan Keputusan Jangka Pendek. Buku 1. Edisi 5. Yogyakarta :BPFE.
- Mulyadi. 2013. Auditing (Pengauditan), Buku I Edisi Ke Enam, PT. Salemba Empat.
- Purba, Marisi P. 2006. “Asumsi Going Concern”. Edisi2, cetakan ke 1, Yogyakarta Ekuilibria.
- Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi ke 4. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017. Statistika Untuk Penelitian, cetakan ke 28, Januari 2017 Penerbit Alfabeta Bandung
- Suwardjono. 2017. Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Peraturan - Peraturan

- Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta
NOMOR : Kep-308/BEJ/07-2004
Nomor I-1 tentang Penghapusan
Pencatatan (delisting) dan Pencatatan
Kembali (relisting)
Saham di Bursa Ketentuan
III.3.1.1.
- IAI - Kompartemen Akuntan Publik, 2011.
Standar Profesional Akuntan Publik,
Jakarta, Salemba Empat.
- IAPI. (2013). Standar Audit (SA
570)/Institut Akuntan Publik
Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa
Akuntan Publik Bab I Pasal 1